

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Statistik Deskriptif

Pada bagian ini akan membahas mengenai statistik deskriptif pada penelitian ini. Dari data awal berjumlah 1864, ternyata ada cukup banyak data yang tidak normal sehingga data normalnya berjumlah 904.

Tabel 4.1.

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kep_Manajerial	904	,00	89,44	5,7873	14,77061
Kep_Blockholder	904	7,18	100,00	70,9947	17,24522
Kep_Pemerintah	904	,00	1,00	,0243	,15418
Diversifikasi	904	,00	1,00	,2588	,43825
Uk_DK	904	2,00	10,00	3,5962	1,44275
Independensi_DK	904	,13	,83	,3986	,10893
Pengungkapan_Anti_Korupsi	904	,00	,35	,0514	,04976
Valid N (listwise)	904				

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019)

Dalam tabel 4.1. memberikan gambaran mengenai jumlah sampel penelitian, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari

setiap variabel penelitian. Nilai minimum untuk variabel kepemilikan manajerial sebesar 0.000 (ADES Tahun 2013) dan maksimum 89.44 (BTON Tahun 2017). Nilai rata-rata atau mean untuk variabel kepemilikan manajerial sebesar 5.7873 dengan standar deviasi 14.77061. Pada umumnya dewan komisaris atau direksi memiliki saham perusahaan dengan prosentase < 10% menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Hanim (2005) mengatakan bahwa rata – rata perusahaan memiliki kepemilikan sebesar 6,45% hasil tersebut hampir sama dengan hasil pengujian yang telah dilakukan oleh peneliti. Dengan kepemilikan manajerial <10% dewan komisaris atau direksi dapat dianggap sebagai pemilik perusahaan, namun prosentase saham yang dimiliki oleh dewan tidak cukup kuat untuk mempengaruhi keputusan perusahaan. Dilihat dari nilai maksimal didapat angka 89,44% angka tersebut didapat dari penjumlahan prosentase kepemilikan saham manajer dan jika dilihat secara perorangan kepemilikan saham manajer berada di bawah 10% kecuali bagi pemegang saham pengendali.

Nilai minimum untuk variabel kepemilikan *blockholder* 7.18 (PLAS Tahun 2017) dan nilai maksimumnya 100.00 (99.99) (BRIS Tahun 2017). Sedangkan nilai rata-rata atau mean sebesar 70.9947. belum ada aturan yang mengatur mengenai kepemilikan *blockholder* dalam perusahaan namun jika dilihat dari hasil rata – rata pengujian menunjukkan bawa proporsi saham biasa yang dimiliki oleh pemegang saham luar mencapai 70.9947% yang biasanya hanya dimiliki oleh sekelompok kecil pemegang saham.

Nilai minimum untuk variabel kepemilikan pemerintahan 0.00 (TAXI Tahun 2013) dan nilai maksimumnya 1.00 (WSKT Tahun 2013), diwakili dengan *dummy variable*. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 0.0243 dengan nilai standar deviasi 0.15418. Belum ada aturan yang mengatur mengenai berapa jumlah minimal atau maksimal kepemilikan saham yang dapat dimiliki pemerintah dalam sebuah perusahaan, namun jika dilihat hasil rata – rata pada pengujian yang sudah dilakukan maka dapat diketahui masih sedikit perusahaan yang pada struktur kepemilikan sahamnya terdapat kepemilikan pemerintah.

Nilai minimum untuk variabel diversifikasi 0.00 (ADES Tahun 2013) dan nilai maksimumnya 1.00 (ADHI Tahun 2013) diwakili dengan *dummy variable*. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 0.2588, serta nilai standar deviasi sebesar 0.43825. Dilihat dari hasil pengujian dapat diketahui bahwa sebagian besar perusahaan pada pengujian ini tidak terdiversifikasi.

Nilai minimum untuk variabel ukuran dewan komisaris 2.00 (APIC Tahun 2013) dan nilai maksimumnya 10.00 (AUTO Tahun 2013). Sedangkan nilai rata-rata sebesar 3.5962, serta nilai standar deviasi 1.44275. Dengan melihat hasil pengujian yang sudah dilakukan diketahui bahwa nilai minimal yang didapat adalah 2 artinya setiap perusahaan pada pengujian ini sudah taat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33 /POJK.04/2014 yang mengharuskan perusahaan minimal memiliki 2 anggota dewan komisaris, jika dilihat dari hasil rata – rata maka dapat disimpulkan bahwa rata – rata perusahaan memiliki 3 sampai 4 anggota dewan komisaris.

Nilai minimum untuk variabel komisaris independen 0.13 (0,125) (KMTR Tahun 2017) dan maksimum 0.75 (BRIS Tahun 2017) dengan rata-rata 0.3985 serta standar deviasi sebesar 0.10860. Dari hasil statistik deskriptif yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa rata-rata komisaris independen yang dimiliki sebuah perusahaan adalah 39.85%, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh OJK bahwa dewan komisaris independen dalam perusahaan wajib paling kurang 30% artinya rata-rata perusahaan sudah mematuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 33 /POJK.04/2014. Jika kita melihat nilai minimum yang keluar dari hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa masih ada beberapa perusahaan yang tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh OJK.

Nilai minimumnya untuk variabel pengungkapan anti-korupsi 0.00 (BTEL Tahun 2017) dan maksimum 0.35 (BNGA Tahun 2017) dengan rata-rata 0.0514 serta standar deviasi sebesar 0.04976. Skor tertinggi adalah pada item *Whistleblower*. Dengan melihat hasil pengujian yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa masih sedikit perusahaan yang melakukan pengungkapan anti-korupsi karena jika dilihat dari rata-ratanya hanya 5% informasi anti-korupsi yang diungkapkan oleh perusahaan dan dengan nilai maksimal 35% informasi anti-korupsi yang diungkapkan. Sedikitnya pengungkapan anti-korupsi yang dilakukan oleh perusahaan disebabkan karena pengungkapan anti-korupsi masih bersifat suka rela, belum ada aturan yang mengharuskan bahwa pengungkapan anti-korupsi harus dilakukan sehingga tidak semua perusahaan melakukan pengungkapan anti-korupsi

4.2. Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik pada penelitian ini dilakukan dengan uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan uji heteroskedastisitas:

4.2.1. Uji Normalitas

Untuk pengujian normalitas data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Sminov* dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.2. Hasil Uji Normalitas Awal

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	.209	1864	.000

a. Lilliefors Significance Correction

Tabel 4.3. Hasil Uji Normalitas Akhir

	Kolmogorov-Smirnov ^a		
	Statistic	df	Sig.
Unstandardized Residual	,023	904	,200*

*. This is a lower bound of the true significance.

a. Lilliefors Significance Correction

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019)

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa hasil pengujian untuk normalitas akhir dilihat dari nilai *Kolmogorof-Smirnov sig.* sebesar $0,200 > 0,05$ sehingga data pada penelitian ini normal.

4.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas Adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah antar variabel independen terjadi korelasi atau tidak. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas maka dilihat dari nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. Jika nilai VIF < 10 dan *Tolerance* $> 0,1$, maka dipastikan tidak terjadi multikolinearitas. Berikut ini adalah hasilnya:

Tabel 4.4. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kep_Manajerial	,985	1,015
Kep_Blockholder	,969	1,032
Kep_Pemerintah	,880	1,136
Diversifikasi	,984	1,016
Uk_DK	,846	1,181
Independensi_DK	,958	1,044

a. Dependent Variable: Pengungkapan_Anti_Korupsi

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui bahwa hasil pengujian multikolinearitas memiliki nilai Tolerance untuk masing-masing variabel

independen $> 0,1$ dan untuk nilai VIF < 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas pada penelitian ini.

4.2.3. Uji Autokorelasi

Untuk pengujian autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan uji *Durbin Watson* (DW) dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5. Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,890 ^a	,793	,791	,02273	1,988

a. Predictors: (Constant), Independensi_DK, Kep_Blockholder, Diversifikasi, Kep_Manajerial, Kep_Pemerintah, Uk_DK

b. Dependent Variable: Pengungkapan_Anti_Korupsi

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019)

Berdasarkan pada tabel di atas diketahui hasil pengujian autokorelasi adalah sebesar 1,988 berada diantara 1,5 dan 2,5 artinya tidak terjadi autokorelasi pada penelitian ini.

4.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini untuk menguji heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser*. Dalam uji *Glejser*, nilai mutlak residual ($|u|$) diregresikan dengan variabel independen. Berikut ini adalah hasil pengujiannya:

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,040	,007		5,365	,000
	Kep_Manajerial	4,240E-5	,000	,020	,581	,561
	Kep_Blockholder	3,069E-5	,000	,016	,487	,626
	Kep_Pemerintah	,007	,007	,034	,963	,336
	Diversifikasi	-,003	,002	-,041	-1,219	,223
	Uk_DK	-6,913E-5	,001	-,003	-,086	,932
	Independensi_DK	,003	,010	,010	,301	,763

a. Dependent Variable: abs_res

Berdasarkan pada tabel 4.6. diketahui hasil pengujian heteroskedastisitas untuk masing-masing variable independen memiliki nilai signifikansi di atas 0,05 sehingga dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.3. Pengujian Model Fit

Tabel 4.7. Hasil Uji Model Fit

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,772	6	,295	571,688	,000 ^b
	Residual	,463	897	,001		
	Total	2,236	903			

a. Dependent Variable: Pengungkapan_Anti_Korupsi

b. Predictors: (Constant), Independensi_DK, Kep_Blockholder, Diversifikasi, Kep_Manajerial, Kep_Pemerintah, Uk_DK

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019)

Dari tabel diatas diketahui nilai sig. F = 0.000 < 0.05 dapat dikatakan bahwa model fit, jadi variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi dependen.

4.4. Pengujian Koefisien Determinasi

Tabel 4.8. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,890 ^a	,793	,791	,02273	1,988

a. Predictors: (Constant), Independensi_DK, Kep_Blockholder, Diversifikasi, Kep_Manajerial, Kep_Pemerintah, Uk_DK

b. Dependent Variable: Pengungkapan_Anti_Korupsi

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019)

Dari tabel diatas diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,791 artinya variabel independen mempengaruhi dependen sebesar 79,1% sedangkan sisanya sebesar 20,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

4.5. Pengujian Hipotesis

Setelah semua asumsi klasik telah terpenuhi, maka berikutnya dilakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Hipotesis
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-,023	,005		-4,384	,000	
Kep_Manajerial	,000	,000	,058	3,764	,000	Diterima
Kep_Blockholder	,000	,000	-,121	-7,828	,000	Ditolak
Kep_Pemerintah	,194	,005	,600	37,056	,000	Diterima
Diversifikasi	,011	,002	,094	6,142	,000	Diterima
Uk_DK	,015	,001	,431	26,056	,000	Diterima
Independensi_DK	,093	,007	,204	13,141	,000	Diterima

a. Dependent Variable: Pengungkapan_Anti_Korupsi

Sumber: Data Sekunder yang Diolah (2019)

Hipotesis Pertama

Dari tabel 4.9. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel struktur kepemilikan manajerial sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien regresi $+0.058$ artinya hipotesis pertama pada penelitian ini diterima.

Hipotesis Kedua

Dari tabel 4.9. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel struktur kepemilikan blockholder sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien $-0,121$ artinya hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak karena berbeda arah.

Hipotesis Ketiga

Dari tabel 4.9. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel struktur kepemilikan pemerintah sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien $+0,600$ artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima.

Hipotesis Keempat

Dari tabel 4.9. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel diversifikasi anak perusahaan sebesar $0,000 < 0,05$ hipotesis ini merupakan hipotesis tanpa arah sehingga beta pada penelitian ini tidak diperhatikan, artinya hipotesis keempat pada penelitian ini diterima.

Hipotesis Kelima

Dari tabel 4.9. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel independensi dewan komisaris sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien $+0,431$ artinya hipotesis kelima pada penelitian ini diterima.

Hipotesis Keenam

Dari tabel 4.9. diketahui nilai signifikansi t untuk variabel ukuran dewan komisaris sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien $+0,204$ artinya hipotesis keenam pada penelitian ini diterima.

4.6. Pengujian Sensitifitas Menggunakan Regresi Logistik

Tabel 4.10. Hasil Pengujian Regresi Logistik

		Variables in the Equation					
		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	KEP_MANAJERIAL	.003	.004	.526	1	.468	1.003
	KEP_BLOCKHOLDER	-.003	.004	.569	1	.451	.997
	KEP_PEMERINTAHAN	.560	.481	1.355	1	.244	1.751
	DIVERSIFIKASI	-.154	.139	1.239	1	.266	.857
	INDEPENDENSI_DK	.243	.044	30.618	1	.000	1.275
	UKURAN_DK	2.094	.600	12.168	1	.000	8.116
	Constant	.010	.407	.001	1	.981	1.010

a. Variable(s) entered on step 1: KEP_MANAJERIAL, KEP_BLOCKHOLDER, KEP_PEMERINTAHAN, DIVERSIFIKASI, INDEPENDENSI_DK, UKURAN_DK.

Keharusan normalitas mengakibatkan penguji untuk menghilangkan sejumlah sampel pada penelitian ini. Penghilangan sampel tersebut akan mempengaruhi keputusan hipotesis, karena itu pengujian sensitivitas dilakukan untuk menghindari pengurangan sampel yang terlalu banyak. Setelah dilakukan pengujian ditemukan bahwa hasil hipotesis yang konsisten adalah independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan dan ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan diterima, sementara hipotesis lainnya ditolak. Dengan demikian hasil pengujian sebelumnya belum konklusif atau meyakinkan sehingga kesimpulan harus diambil dengan hati-hati.

4.7. Pembahasan

4.7.1. Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial Terhadap Pengungkapan Anti-Korupsi Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel struktur kepemilikan manajerial $< 0,05$ artinya hipotesis pertama pada penelitian ini diterima. Jadi kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan.

Pemegang saham merupakan salah satu komponen penting bagi sebuah perusahaan agar perusahaan dapat berjalan. Prosentase struktur kepemilikan saham di setiap perusahaan tentunya berbeda-beda, terdapat tiga struktur kepemilikan saham yaitu struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan *blockholder*,

dan struktur kepemilikan pemerintah. Dengan adanya struktur kepemilikan tersebut akan mempengaruhi tinggi rendahnya pengungkapan yang ada dalam sebuah perusahaan. Struktur kepemilikan manajerial merupakan saham biasa yang dimiliki oleh CEO dan komisaris (Eng & Mak, 2003).

Kepemilikan manajerial merupakan prosentase besarnya kepemilikan saham oleh pihak direksi perusahaan. Tingkat kepemilikan saham manajer dapat mengurangi biaya agensi karena berfungsi untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan kepentingan pemegang saham lainnya (Jensen dan Meckling, 1976). Teori agensi memprediksi bahwa ada pengaruh positif antara kepentingan manajemen dan pengungkapan informasi laporan keuangan, termasuk dalam luas pengungkapan anti-korupsi dalam laporan keuangan. Warfield et al. (1995) memberikan bukti yang mendukung hal ini dan hasil penelitiannya menemukan bahwa tingkat kepemilikan saham oleh manajemen berpengaruh positif terhadap jumlah informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Teori *goal congruence* merupakan teori keselarasan antara tindakan individu untuk meraih tujuan pribadi guna membantu pencapaian tujuan organisasi, selaras dengan teori ini maka dengan adanya kesamaan atau keselarasan tujuan dimana manajer dan pemegang saham ingin sama-sama untung, maka akan mendorong semakin tingginya transparansi termasuk dalam pengungkapan anti-korupsi. Dengan demikian dapat dikatakan adanya pengaruh positif antara kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan anti korupsi.

4.7.2. Pengaruh Struktur Kepemilikan *Blockholder* Terhadap Pengungkapan Anti-Korupsi Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel struktur kepemilikan *blockholder* sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien $-0,118$ artinya hipotesis kedua pada penelitian ini ditolak karena berbeda arah. Jadi struktur kepemilikan *blockholder* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan.

Kepemilikan *blockholder* adalah saham biasa yang dimiliki oleh investor dengan posisi kepemilikan signifikan dalam saham umum perusahaan, umumnya setiap pemegang saham setidaknya memiliki 5% kepemilikan saham perusahaan atau lebih. *Blockholder* mungkin seorang individual, perusahaan lain atau investor institusional. *Blockholder* seringkali dapat mempengaruhi pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan *blockholder* yang tinggi artinya saham dikendalikan oleh sekelompok kecil orang, sehingga kepemilikannya cenderung untuk terkonsentrasi, hal tersebut mengakibatkan keefisienan mekanisme pengawasan untuk mencegah manajer mencari keuntungan pribadi, dengan tingginya kepemilikan *blockholder* mengakibatkan *blockholder* lebih memiliki kekuatan untuk lebih menuntut manajer untuk melakukan pengungkapan yang transparan karena *blockholder* ingin mengetahui apakah dana yang sudah diinvestasikan mereka dikelola dengan benar. Alasan ditolaknya hipotesis ini adalah karena struktur kepemilikan *blockholder* cenderung untuk mengarah kepada kepemilikan terpusat sehingga pihak lain tidak berani untuk menentang kepentingan atau keinginan pihak *blockholder*, hal ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya *fraud* yang semakin tinggi dan pihak

manajemen tidak berani untuk mengungkapkan korupsi yang terjadi, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur kepemilikan *blockholder* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan. Sesuai teori keagenan semakin kecil *blockholder ownership* semakin besar pula pengungkapan anti-korupsi perusahaan. Kepemilikan *blockholder* yang memusat akan memudahkan pemegang saham dalam mengambil keputusan untuk melakukan pengungkapan anti-korupsi perusahaan. Oleh karena itu, semakin kecil *blockholder ownership* akan mendorong perusahaan lebih memilih untuk mengungkapkan anti-korupsi perusahaan.

Kepemilikan *blockholder* memang mempengaruhi monitoring perusahaan, tetapi dalam hubungannya dengan perbedaan sistem, yaitu efek dalam sistem hukum umum berbasis pasar (AS dan Inggris) berbeda dari yang ditemukan dalam sistem berbasis kontrol sipil-hukum (benua Eropa) serta Indonesia. *Blockholder* di AS cenderung berorientasi *long term* atau jangka panjang sehingga mereka lebih fokus pada monitoring yang lebih baik hal ini mengakibatkan dalam terbentuknya *blockholder* terdapat beberapa kelompok yang mengawasi jalannya perusahaan dan tidak hanya terfokus pada 1 atau 2 kelompok saja, sedangkan *blockholder* di Indonesia lebih cenderung memiliki orientasi *short term* atau jangka pendek untuk kepentingan individu yang mengakibatkan kecenderungan kepemilikan *blockholder* di Indonesia menjadi terkonsentrasi pada kelompok kecil saja (Thomsen et. al., 2003). Maka hal ini menjadikan dari hasil penelitian ini struktur kepemilikan *blockholder* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan.

Hasil penelitian ini sependapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Eng & Mak (2003) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan *blockholder* berpengaruh negatif terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan.

4.7.3. Pengaruh Struktur Kepemilikan Pemerintah Terhadap Pengungkapan Anti-Korupsi Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel struktur kepemilikan pemerintah sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien $+0,603$ artinya hipotesis ketiga pada penelitian ini diterima. Jadi struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan.

Struktur kepemilikan pemerintah merupakan prosentase saham biasa yang dimiliki oleh pemerintah. Kepemilikan saham oleh pemerintah menyebabkan perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya harus selaras dengan kepentingan pemerintah. Pemerintah berhak menunjuk direktur perusahaan tersebut sehingga keputusan bisnis yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan pemerintah.

Dengan dimiliki atau tidaknya kepemilikan pemerintah, akan mengakibatkan pengungkapan yang berbeda pada perusahaan. Perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah dalam beroperasi akan selaras dan bertindak sesuai prosedur atau peraturan yang berkaitan dengan penegakan korupsi, sehingga proses monitoring yang semakin baik dari pihak pemerintah. Berbeda dengan perusahaan yang tidak

dimiliki oleh pemerintah, maka akan tidak selaras atau tidak patuh dengan prosedur dan peraturan yang berkaitan dengan pencegahan korupsi, sehingga proses monitoring tidak baik. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti korupsi perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Eng & Mak (2003), dan Huafang dan Jianguo (2007) yang menyatakan bahwa struktur kepemilikan pemerintah berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan.

4.7.4. Pengaruh Diversifikasi Anak Perusahaan Terhadap Pengungkapan Anti-Korupsi Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel diversifikasi anak perusahaan sebesar $0,000 < 0,05$ artinya hipotesis keempat pada penelitian ini diterima. Jadi diversifikasi anak perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan.

Salah satu cara perusahaan untuk mempertahankan bisnisnya atau mengembangkan bisnisnya adalah dengan melakukan perluasan terhadap segmen bisnisnya, artinya perusahaan tidak hanya berfokus pada satu segmen bisnis saja namun ada beberapa segmen bisnis yang dimiliki oleh perusahaan tersebut (Bens & Monahan, 2004).

Perusahaan yang memiliki anak perusahaan dengan beberapa segmen bisnis merupakan perusahaan terdiversifikasi. Perusahaan yang terdiversifikasi berarti perusahaan induk memiliki segmen bisnis yang tidak sama dengan anak perusahaan sehingga akan ada masalah yang timbul akibat perusahaan tersebut terdiversifikasi yaitu asimetri informasi antara perusahaan induk dengan anak perusahaannya, dengan adanya kemungkinan asimetri informasi yang terjadi maka perusahaan akan semakin melakukan pengungkapan mengenai informasi yang ada di perusahaan guna untuk menghilangkan asimetri informasi yang terjadi dengan begitu akan berdampak pada pengungkapan anti-korupsi yang lebih baik.

Argumen lain adalah perusahaan yang semakin terdiversifikasi dalam arti memiliki anak perusahaan yang segmen bisnisnya berbeda maka akan semakin kompleks/rumit operasionalisasi bisnisnya, sehingga semakin rawan terjadi korupsi. Dengan adanya sifat oportunistik manajer yang mementingkan kepentingan pribadinya manajer akan menggunakan kesempatan ini untuk menutupi keburukan yang ada di perusahaan hal tersebut dapat berupa korupsi, karena akan sulit bagi orang luar untuk mendeteksi korupsi yang terjadi di perusahaan karena aktivitas perusahaan yang lebih kompleks sehingga manajer akan menggunakan kesempatan ini untuk bertindak koruptif dan tidak diketahui oleh pihak luar. Dengan demikian dapat dikatakan diversifikasi anak perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan.

4.7.5. Pengaruh Independensi dewan komisaris Terhadap Pengungkapan Anti-Korupsi Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel independensi dewan komisaris sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien $+0,427$ sehingga artinya hipotesis kelima pada penelitian ini diterima. Jadi independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan

Suatu perusahaan membutuhkan struktur organisasi yang baik agar perusahaan dapat berjalan baik pula, tentu saja setiap jabatan dalam struktur organisasi akan ditempati oleh personil – personil yang tepat dan berpengalaman dalam jabatannya tersebut. Salah satu bagian dari struktur organisasi adalah komisaris perusahaan. Independensi dewan komisaris dalam sebuah perusahaan terdiri dari dua jenis yaitu dewan komisaris yang berasal dari dalam perusahaan dan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan. Lebih banyaknya dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan akan mempengaruhi tingkat pengungkapan anti-korupsi perusahaan karena direktur dari luar perusahaan mendorong perusahaan untuk lebih mengungkapkan, dan menyediakan informasi pada investor.

Independensi dewan komisaris yang semakin tinggi dalam arti proporsi dewan komisaris dari luar perusahaan banyak maka akan meningkatkan proses monitoring atau pengawasan yang lebih baik dan membatasi kesempatan manajerial untuk bertindak seenaknya. Hal ini akan lebih mendorong perusahaan untuk

melakukan pengungkapan karena komisaris independen lebih objektif dan lebih mendorong perusahaan untuk menyediakan informasi pada investor. Diharapkan dengan lebih banyaknya independensi dewan komisaris dari luar perusahaan akan meningkatkan pengungkapan anti-korupsi perusahaan.

Dewan komisaris yang independen akan semakin mendorong dewan komisaris untuk semakin berkomitmen pada kebijakan dan program anti-korupsi berdasarkan prinsip-prinsip bisnis dan memberikan kepemimpinan, sumber daya, dan dukungan aktif untuk pelaksanaan manajemen terhadap program, semakin patuh dengan program yang wajib bagi direksi dan mengajukan sanksi yang sesuai untuk pelanggaran programnya, perusahaan menetapkan mekanisme umpan balik dan proses internal lainnya yang mendukung peningkatan berkelanjutan dari program, manajemen senior perusahaan memantau program dan secara berkala meninjau keberlanjutan, kecukupan dan efektivitas program, dan mengimplementasikan peningkatan yang sesuai, manajemen senior harus secara berkala melaporkan hasil tinjauan program kepada komite audit, dewan atau badan yang setara, manajemen menawarkan dialog dengan LSM dan publik untuk mempromosikan kesadaran dan kerjasamanya dengan perlawanan terhadap suap dan pemerasan, dan komite audit, dewan atau badan yang setara harus membuat penilaian independen terhadap kecukupan program dan mengungkapkan temuannya dalam laporan tahunan perusahaan kepada para pemegang saham.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Eng & Mak (2003) yang mengatakan bahwa peran dari dewan komisaris adalah untuk mengawasi keputusan manajemen, dengan meningkatnya dewan direktur dari luar

perusahaan akan menghasilkan pengawasan yang lebih baik. Hasil ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Joseph et al (2016) menyatakan bahwa independensi dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan. Penelitian lain yang sependapat adalah penelitian Said (2000).

4.7.6. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Pengungkapan Anti-Korupsi Perusahaan

Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa nilai signifikansi t untuk variabel ukuran dewan komisaris sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien $+0,204$ sehingga artinya hipotesis keenam pada penelitian ini diterima. Jadi ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan.

Ukuran dewan komisaris merupakan suatu ukuran atau jumlah dewan komisaris yang ada di sebuah perusahaan, semakin banyak dewan komisaris yang ada di sebuah perusahaan akan meningkatkan pengawasan dalam perusahaan tersebut sehingga menimbulkan tekanan manajemen yang mendorong perusahaan untuk lebih melakukan pengungkapan informasi perusahaannya (Sembiring, 2006). Dewan Komisaris adalah dewan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi. Salah satu bagian dari struktur organisasi adalah dewan komisaris. Ukuran dewan komisaris merupakan seberapa banyak anggota dewan yang ada dalam perusahaan, dengan adanya dewan komisaris dalam perusahaan akan menekan perusahaan untuk melakukan pengungkapan informasi perusahaan.

Semakin banyak ukuran dewan komisaris akan meningkatkan monitoring yang semakin efektif dan menimbulkan tekanan manajemen sehingga akan mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan terhadap informasi yang ada dalam perusahaan. Semakin besar ukuran dewan komisaris akan meningkatkan komitmen pada kebijakan dan program anti-korupsi berdasarkan prinsip-prinsip bisnis dan memberikan kepemimpinan, sumber daya, dan dukungan aktif untuk pelaksanaan manajemen terhadap program, kepatuhan dengan program yang wajib bagi direksi dan mengajukan sanksi yang sesuai untuk pelanggaran programnya, perusahaan menetapkan mekanisme umpan balik dan proses internal lainnya yang mendukung peningkatan berkelanjutan dari program, manajemen senior perusahaan memantau program dan secara berkala meninjau keberlanjutan, kecukupan dan efektivitas program, dan mengimplementasikan peningkatan yang sesuai, manajemen senior harus secara berkala melaporkan hasil tinjauan program kepada komite audit, dewan atau badan yang setara, manajemen menawarkan dialog dengan LSM dan publik untuk mempromosikan kesadaran dan kerjasamanya dengan perlawanan terhadap suap dan pemerasan, dan komite audit, dewan atau badan yang setara harus membuat penilaian independen terhadap kecukupan program dan mengungkapkan temuannya dalam laporan tahunan perusahaan kepada para pemegang saham.

Hasil penelitian ini didukung penelitian yang dilakukan oleh Sembiring (2006) yang mengatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan. Hasil ini juga didukung penelitian yang dilakukan oleh Maharesti (2018) yang menyatakan bahwa ukuran dewan

komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan anti-korupsi perusahaan.

Penelitian lain yang sependapat adalah penelitian Said (2000).

